

# DEMOKRATISASI DAN PERMASALAHANNYA: INDONESIA PASCA 1998

Oleh: Indria Samego.<sup>1</sup>

SEPERTI halnya negara-negara di belahan dunia lain, Indonesia memasuki akhir dasawarsa 1990an menghadapi perkembangan politik yang tidak ada presedennya. Setelah melewati masa-masa kepemimpinan politik yang sangat kuat baik pada era Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto, kepolitikan Indonesia dihadapkan pada tantangan baru, yakni tuntutan universal mengenai pemberlakuan Hak-hak Azasi Manusia (HAM), Lingkungan Hidup, dan Demokrasi dalam system pemerintahannya. Ditambah oleh kian lemahnya sumber legitimasi Presiden Soeharto untuk mempertahankan system politik yang diyakininya, sejak 21 Mei 1998 praktis Indonesia memasuki sebuah suasana yang sama sekali baru. Kegagalan untuk membangun demokrasi dari "atas", telah mendorong lahirnya demokrasi dari "bawah". Bila dalam system yang disebut pertama, aktor politiknya masih terbatas dan dapat dikendalikan perilakunya, maka dalam system yang disebut kemudian, justru sebaliknya. Masing-masing aktor berdiri sendiri, saling bersaing dan belum tentu satu dengan lain mau membangun bekerjasama – kecuali jelas *rewards*-nya - sebagaimana biasa berlaku dalam sebuah system politik yang sudah mapan.

Sebenarnya, pergeseran dari system politik yang mengutamakan harmoni dan penyeragaman (*authoritarian system*) menuju system politik yang penuh persaingan dan kemajemukan (*Liberal System*), selalu membawa resiko. Tidak satu pun negara yang mengalami proses perubahan dalam Gelombang Ketiga Demokrasi ini terbebas dari persoalan ini. Yang membedakan antara pengalaman satu negara dengan negara lain, hanyalah skala persoalan dan lamanya proses konsolidasi demokrasi itu terjadi. Studi yang menarik dari Samuel Huntington mengenai hal ini, cukup baik untuk dijadikan rujukan. Karena adanya persoalan-persoalan transisi (*transition problems*), masalah kontekstual (*contextual problems*) dan masalah sistemik (*systemic problems*) yang tidak sama antara satu negara dengan lainnya, maka transisi menuju demokrasi itu pun tidak dapat dimatematisasikan. Ada negara yang hanya memerlukan

waktu singkat untuk melakukan proses demokratisasi secara damai, tapi tidak sedikit pula yang justru menghadapi situasi yang kian tak menentu (*reverse wave*).<sup>2</sup> Indonesia, sebagai contohnya, akan secara khusus disinggung dalam akhir tulisan ini. Sebelum sampai ke pengalaman politik mutakhir Indonesia, akan terlebih dahulu dibahas makna demokrasi dan demokratisasi, serta berbagai persoalan yang melingkupinya.

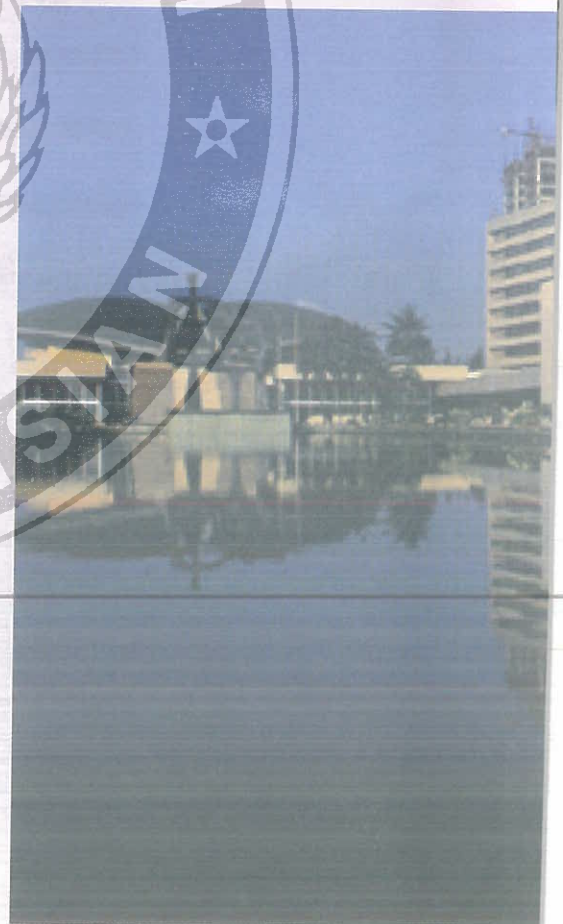
## MAKNA DEMOKRASI DAN DEMOKRATISASI

Nampaknya tidak ada pengertian tunggal mengenai konsep politik yang sekarang mewamai arus utama (*mainstream*) politik di Dunia Ketiga ini. Sejalan dengan tahap perkembangannya, ia pun mengalami perkembangan makna sesuai dengan "budaya" dan karakter politik masyarakat yang menguutinya. Pada awalnya, demokrasi ditafsirkan secara normative dan ideal, yakni sebagai bentuk "pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*)". Kemudian sejak masa pemerintahan Presiden Abraham Lincoln (AS), rumusannya ditambah, yaitu "*government not only by but also for the people*" artinya, suatu system pemerintahan yang sesuai dengan kehendak rakyat.<sup>3</sup>

Namun, persoalannya tidak terlalu mudah ketika harus diterapkan dalam praktek. Setidaknya, ada beberapa hal yang mengharuskan batasan pengertian tersebut perlu dijabarkan. Pertama, siapa sesungguhnya yang disebut 'rakyat' (*people*) di sini. Apakah semua warga Negara, atau sebagian dari mereka yang berhak memilih dan dipilih, atau hanya kalangan elite terbatas saja? Pertanyaan ini, merupakan bahan diskusi menarik dan tak pernah berujung di antara kalangan Realis dan Idealis dalam aliran Ilmu Politik. Kedua, siapa yang harus melaksanakan pemerintahan dan bagaimana caranya bila konsep 'people' tersebut tak pernah jelas? Ketiga, kepada kepentingan siapa pemerintah harus dijalankan manakala terjadi konflik dalam masyarakat yang mendukungnya?

Barangkali, karena itulah maka pengertian klasik mengenai demokrasi tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan kontekstual. Dalam bukunya *Capitalism, Socialism, and Democracy* yang terbit pada 1942, Joseph Schumpeter menggeser pemahaman normative klasik yang terlalu umum, dari "*the will of the people*" menjadi "pengaturan kelembagaan yang ditujukan untuk membuat keputusan

politik di mana masing-masing individu memiliki kekuasaan (*power*) untuk menentukan dengan sarana persaingan yang lebih kompetitif lewat suara rakyat".<sup>4</sup> Dengan rumusan seperti itu, Schumpeter berusaha untuk keluar dari bingkai yang terlalu ideal, rasionalistik, utopis menuju pemahaman demokrasi yang lebih empiris, deskriptif, kelembagaan dan prosedural. Dengan kata lain, ia mencoba untuk lebih melihat batasan pengertian itu dalam perspektif praksis, tidak sekedar teoritis. Di samping memperhitungkan sisi nilainya, yang tidak kalah penting adalah kenyataan dalam praktek, baik aspek bagaimana (*how*) dan juga lembaganya



(institutions). Dalam konteks inilah, ada baiknya kita menghargai pandangan Robert Dahl, penulis berikutnya yang terkenal dengan bukunya *Polyarchy: Participation and Opposition* (1971), yang memberi penekanan pada hakikat demokrasi, yaitu: kontestasi dan partisipasi dalam setiap pengambilan keputusan.

Untuk memperoleh gambaran lebih konkrit lagi mengenai demokrasi, perlu juga kiranya dikemukakan sejumlah unsure penting yang pada umumnya sangat diperlukan di dalam mendorong proses konsolidasinya. Beberapa di antaranya adalah: tingkat kemakmuran ekonomi yang cukup tinggi, terjadinya distribusi pendapatan yang cukup memadai, berlakunya ekonomi pasar, adanya pembangunan ekonomi dan modernisasi social, hilangnya system feodal dalam masyarakat, kuatnya kaum borjuis (*no bourgeois, no democracy* kata Barrington Moore), kuatnya kelas menengah, tingginya tingkat pendidikan masyarakat, budaya lebih dijadikan instrumen, pluralisme social dan adanya kelompok intermediasi yang kuat, tingginya tingkat kontestasi dan partisipasi, struktur demokrasi yang terlembagakan, lemahnya kekerasan politik, rendahnya tingkat polarisasi politik dan ekstrimisme, komitmen pemimpin terhadap demokrasi, tradisi toleransi dan kompromi yang tinggi, pengaruh demokrasi global, menghargai hukum dan HAM, homogenitas SARA.<sup>5</sup> Robert Dahl, menambahkan dua

unsure lain yang tidak kalah pentingnya adalah: urbanisasi dan perkembangan media massa

Nampaknya tidaklah terlalu mudah bagi negara manapun untuk menerapkan system politik yang demokratis secara independen. Dalam berbagai kajian ditunjukkan bahwa usaha untuk memperoleh keseluruhan syarat-syarat demokrasi di atas tidak dapat berlangsung secara instant, terbebas dari faktor-faktor eksternal dan struktural. Karena setiap negara dan masyarakat akan menghadapi ketiga persoalan yang dikemukakan Huntington terdahulu, yakni transisi, kontekstual dan sistemik, maka diperlukan sebuah proses yang kemudian disebut sebagai "demokratisasi", yang artinya adalah pergerakan dari system otoriter menuju bentuk pemerintahan yang lebih demokratis (*the movement from authoritarian to democratic forms of rule*)<sup>6</sup>.

Tidaklah terlalu mengherankan bila transisi menuju demokrasi begitu kompleks, memakan waktu (*takes time*) dan juga mahal (*luxurious*). Masalahnya, selain diperlukan adanya basis social yang kondusif terhadapnya, juga elemen-elemen budaya, politik, ekonomi serta lingkungan internasional sangat diperlukan di dalam membangun sebuah system politik yang demokratis. Inggris dan AS sampai ke kondisi yang dewasa secara politik seperti sekarang, memerlukan perjalanan yang amat panjang. Tidak kurang dari dua ratus tahun dibutuhkan untuk itu. Demikian pula halnya

negara-negara besar lain. Belakangan, kita menyaksikan revolusi pemikiran berkembang di hampir seluruh penjuru dunia yang mengedolakan demokrasi, tak terkecuali Indonesia.

Oleh karena itu tidak terlalu keliru jika Francis Fukuyama mengatakan bahwa "sejarah telah berakhir (*the end of history*)", manakala harus menjelaskan fenomena yang demikian. Dengan diadopsinya system nilai demokrasi, terutama liberal, maka secara langsung dan tidak langsung, telah mengakhiri sebuah evolusi persaingan antara dua ideologi besar di dunia, yakni demokrasi liberal yang berdasarkan ekonomi pasar, di satu pihak, melawan komunisme serta sentralisme ekonomi di pihak lain, dengan ideology yang disebut pertama sebagai pemenangnya.

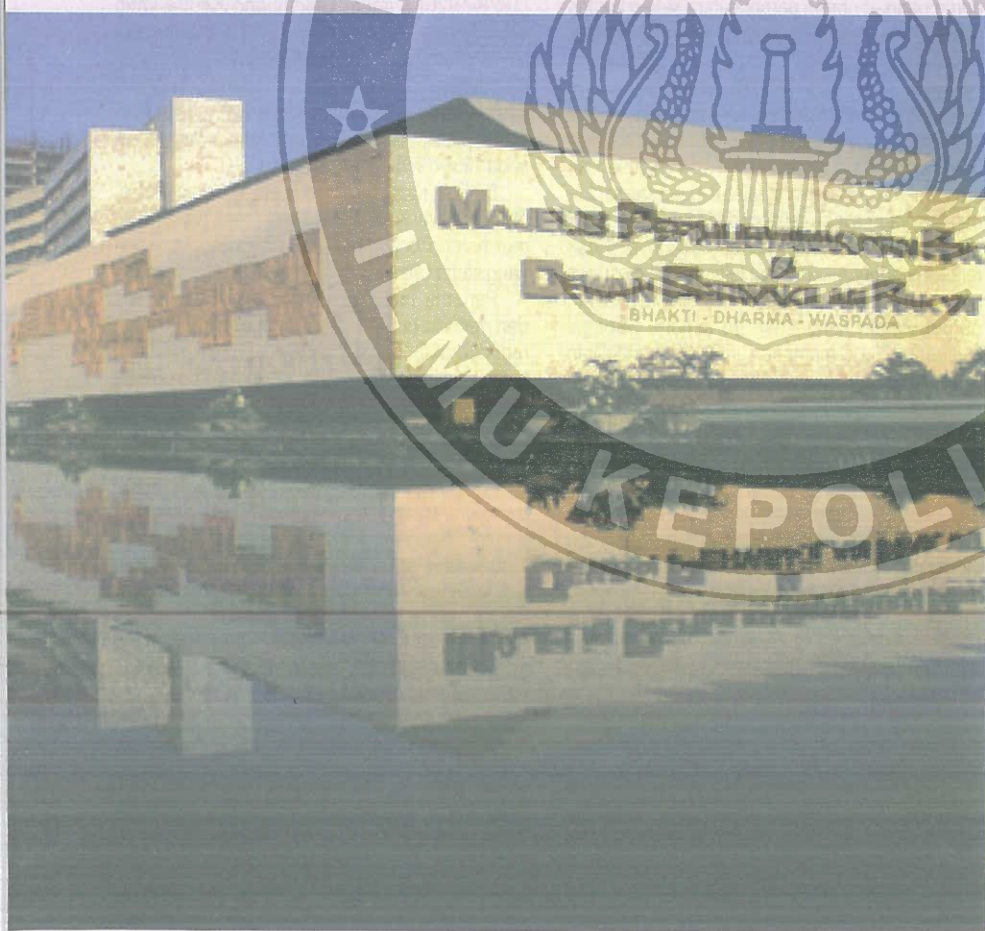
Dengan demikian, menurut dia, sistem demokrasi liberal Barat telah dianggap sebagai bentuk akhir dari pemerintahan manusia (*democracy as the final form of human government*)<sup>7</sup>. Ini semua mengandung pengertian bahwa dewasa ini, demokrasi liberal tidaklah sekedar dominan, melainkan satu-satunya pilihan. Di masa lalu, kata Fukuyama, masih ada alternatif, yakni system Komunis. Namun dengan bubarnya negara-negara Komunis di Eropa Timur, maka kepercayaan masyarakat dunia terhadap ideology Komunis menjadi kian menipis. Pada saat yang sama, mereka melihat banyak negara barat atau Negara non-barat lainnya yang menerapkan system demokrasi liberal, mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pada tahap inilah pikiran-pikiran demokrasi liberal mencuat ke permukaan. Apa yang disebut sebagai Gelombang Demokrasi Ketiga, telah menjadi warna dominan dari wacana bernegara di seluruh dunia. Meski Huntington mengingatkan bahwa tidak berarti semuanya akan berjalan dengan mulus, namun fenomena global sekarang mengarah pada apa yang dikatakan Fukuyama tersebut di atas, "*The End of History*".

#### DEMOKRATISASI DARI "BAWAH" DI INDONESIA

Penulis percaya pada kedua pemikir demokrasi yang sebelumnya sering dikutip, yakni Huntington dan Fukuyama. Dalam konteks Indonesia, pandangan kedua pemikir tersebut memiliki relevansi yang cukup mendasar.

Pertama, apakah memang ada pengaruh dari "berakhirnya sejarah" sebagaimana disebutkan di atas terhadap dinamika politik nasional Indonesia? Secara normative memang kita tidak pernah menyebutkan adanya penerapan Demokrasi Liberal dalam kehidupan bernegara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Tidak satu katapun konsep tersebut tertuang dalam dokumen negara Indonesia. Namun secara empiris, di sana-sini terlihat kesesuaian antara apa yang berkembang dengan pengertian Demokrasi Liberal yang dikemukakan oleh David Held. Penulis ini menganggap bahwa individu harus dibebaskan (*free*) dan setara (*equal*) di dalam menentukan kondisi kehidupannya. Dalam hal ini, dia harus diberi kebebasan untuk menikmati hak-haknya sejauh tidak merugikan hak orang lain.<sup>8</sup>

Kendati kita tidak memiliki latar belakang Pemilu



yang menganut prinsip "jujur dan adil (juri)" serta "langsung, umum, bebas dan rahasia (luber)" – kecuali Pemilu 1955 – toh akhirnya kita dapat melaksanakan Pemilu Legislatif 1999 sampai dengan Pemilu Legislatif 2004 dan dilanjutkan dengan Pilpres serta Pilwapresnya secara relatif memuaskan. Bahkan belakangan, kontes politik yang mengandalkan penentuan suara rakyat secara langsung diteruskan di dalam memilih kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten serta kota. Secara umum, prosesnya cukup memuaskan. Meski di sana-sini ada fenomena kekerasan politik, dan penyimpangan hukum, namun, relatif kurang berarti dibandingkan dengan hasil secara keseluruhan.

Fakta tersebut mengajarkan kepada kita beberapa hal. Pertama, dalam waktu yang relatif cepat dan karena tuntutan dari "bawah", kita telah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi – terutama majoritarianism (voting) – dalam pengambilan keputusan. Karena begitu kuatnya pengaruh HAM dan demokrasi liberal dalam kepolitikan mutakhir Indonesia, model demokrasi consensus (musyawarah), tidak banyak lagi dipraktikkan. Terlalu liberalnya karakter politik kita, serta beragamnya aktor politik yang ada, telah mengakibatkan begitu sulitnya keputusan diambil secara consensus. Karena tidak mudahnya musyawarah dilakukan, maka setiap pembuatan keputusan diserahkan ke mekanisme pasar politik. Sampai ke soal pemilihan bupati, walikota, gubernur dan presiden serta wakil presiden, tidak lagi dilakukan secara tertutup dan terbatas pada kalangan elite politik sebagaimana sebelum reformasi dilakukan, melainkan dilakukan secara terbuka dan diserahkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan Negara.

Kedua, partai politik kini telah menjadi aktor utama dalam kepolitikan nasional, menggantikan TNI dan birokrat sipil sebagaimana berlaku di masa Orde Baru. Ditambah lagi dengan diabsahkannya partai sebagai organisasi politik yang paling berhak mencalonkan Presiden dan Wakilnya di tingkat pusat, dan calon kepala daerah dan wakilnya, di tingkat daerah, makin jelas saja bahwa, pembentukan pemerintahan, selanjutnya diserahkan kepada parpol pemenang pemilu. Sebagai akibatnya, jumlah parpol akan sulit dibatasi. Dalam setiap pemilu akan lahir parpol baru, yang hendak mengadu nasib. Asal memenuhi criteria hukum, setiap parpol berhak mengikuti pemilu. Bila dalam Pemilu 2004 terdapat 24 parpol yang mengikutinya, untuk Pemilu 2009, sudah tercatat 34 parpol akan bertarung memperebutkan kursi DPR yang hanya bertambah 10 dari sebelumnya sebanyak 550. Bisa diduga bahwa harga kursi akan semakin mahal, dan makin keras pula tingkat persaingan untuk menjadi anggota legislative di pusat. Sementara di daerah, juga tidak akan kalah tingkat pertarungannya. Bahkan untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, selain parpol nasional, juga telah lahir parpol local, yang juga diperkenankan untuk mengikuti pemilu 2009 dalam memilih anggota legislative daerah (DPRD I dan II).



Ketiga, kepentingan ideology kurang menjadi pertimbangan utama parpol dalam setiap kontes politik. Demi menjaga *survivality*, kepentingan ideal tersebut telah digantikan oleh pertimbangan-pertimbangan strategis jangka pendek, yakni memenangkan kontes politik. Ditambah lagi dengan lemahnya sumber dana partai, di satu pihak, dan besarnya keperluan finansial untuk mengikuti sebuah proses pemilu, di lain pihak, telah menjadikan pertimbangan pragmatis itu sebagai pilihan utama parpol dalam mempertahankan keberadaannya. Tidak terlalu mengherankan bila belakangan, factor uang menjadi benang merah dari dinamika kehidupan parpol, selain kekuasaan itu sendiri. Sebagai akibatnya, bila kemampuan untuk mengendalikan pengaruh uang dalam politik ini lemah, maka fungsi partai telah digeser, dari fungsi idealnya sebagai penghubung (*interest intermediation*) antara rakyat dengan Negara menjadi sarana pengumpul suara dan dana. Bila kedua variable terakhir itu menjadi tujuan partai, maka makin sulit saja berharap bahwa parpol harus menjadi lembaga demokrasi yang paling diandalkan. Alih-alih reformasi yang kita jalankan dalam sepuluh tahun terakhir ini memberikan manfaat kepada perbaikan bangsa dan Negara, yang terjadi kemudian adalah makin tingginya tingkat persaingan di antara actor-aktor politik di dalam mempertahankan keberadaannya serta dalam memenangkan pemilihan umum. Tanpa menghiraukan nasib rakyat secara keseluruhan, formalism demokrasi menjadi taruhan actor politik tersebut. Pada gilirannya, relasi positif antara demokrasi dengan perbaikan kesejahteraan warga, kian menjauh.

Barangkali kecenderungan semacam itulah yang sejak awal mula diperingatkan Samuel Huntington. Penulis ini menekankan bahwa dalam sejarah

perkembangan demokrasi, dari Gelombang Pertama (1828-1926) sampai Gelombang Kedua yang berlangsung singkat (1943-1962) diantari oleh pengingkaran (*reverse*) yang pertama (1922-1942). Kemudian perkembangan dari Gelombang Kedua menuju Ketiga (1974 dan seterusnya), juga pernah dihadapkan pada pengingkaran kedua yang terjadi pada 1958-1975.

Dengan mengikuti logika pengingkaran di atas, maka tidak mustahil bahwa perjalanan menuju demokrasi di Indonesia pun akan menghadapi suasana yang sama bila sejumlah hal berikut diabaikan:

Pertama, hadirnya pemimpin yang cukup kuat dan memiliki otonomi relative (tidak mutlak) untuk menggerakkan perubahan dan perbaikan. Dalam bahasa yang klise, kita memerlukan sosok negarawan lebih banyak ketimbang politisi. Tanpa kehadiran pimpinan yang berjiwa demikian, maka segala macam kesulitan yang kita hadapi akan tetap menjadi masalah. Persoalan solusi akan tetap menjadi wacana yang tidak pernah didekati secara empirik. Seorang pemimpin yang berjiwa kenegarawan akan lebih mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Kedua, konsolidasi demokrasi lewat pelembagaan partai-partai politik dan lembaga demokrasi lainnya. Kita semua bersepakat untuk memberikan kedaulatan kepada pemilik utamanya, yakni rakyat. Lewat partai politik, rakyat diminta untuk menyalurkan kepentingan dan hak-hak politik mereka. Dalam masyarakat yang tingkat demokrasi telah matang, keberadaan partai sebagai alat *interest intermediation* – penghubung antara rakyat dengan Negara – telah dijalankan dengan baik. Teori ini mengandaikan bahwa partai sungguh-sungguh memiliki legitimasi untuk mewujudkan kepentingan

rakyat. Dengan demikian, siapa pun yang memperoleh kemenangan dalam pemilu, dianggap memenangkan kehendak rakyat. Suasana percaya (*trust*) terhadap partai politik telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam proses demokrasi di Negara-negara demokrasi tersebut. Dengan kata lain, membesarkan partai politik dan menjadikannya sebagai lembaga demokrasi yang legitimate merupakan sebuah kejarusan.

Dalam arti, berbeda dengan apa yang secara retorik diucapkan, praktek demokrasi di negara kita tidaklah berjalan mulus. Pada mulanya banyak yang bersuka cita untuk menjadikannya sebagai sebuah system alternatif atas penyelenggaraan negara yang otoriter di masa lalu, namun belakangan tidak sedikit yang menyangkalnya. Bahkan banyak pula yang bemosalgia dengan masa lalu, dengan mengatakan bahwa reformasi tidak membawa manfaat, justru sebaliknya, reformasi telah membawa bangsa Indonesia ke lembah pertikaian yang berkepanjangan, individualistic, mengabaikan nasionalisme dan integrasi nasional, serta melupakan ideology politik yang sesuai dengan cita-cita bangsa.

Terlepas dari benar atau tidaknya gugatan di atas, yang pasti adalah bahwa setelah sekian tahun reformasi ini digulirkan, arah menuju demokrasi masih belum terlihat secara jelas. Apalagi bila dikaitkan dengan sejumlah factor yang harus mendukungnya, nampaknya proses transisi menuju

demokrasi ini berlangsung kian terjal, penuh onak dan duri.

Ini tidak berarti bahwa penulis pesimis dengan masa depan demokrasi di Indonesia, tapi seperti yang dikatakan Huntington, apa yang disebut sebagai pengingkaran (*reverse*) pasti di alamai oleh masyarakat mana pun, tak terkecuali Indonesia. Jika demokrasi mempersyaratkan sejumlah unsure yang disebutkan di awal tulisan ini, maka penulis agak yakin, bahwa transisi ini memang masih panjang. Lupakan dengan soal basis social dan budaya demokrasi, tapi yang lebih terukur pun masih belum terwujud di sini. Beberapa di antaranya adalah: tingkat pendidikan masyarakat, urbanisasi, pembangunan media massa, penghargaan terhadap hukum, serta luntumnya politik identitas dan berbagai ekstrimisme, masih mewarnai proses perubahan di Indonesia. Semuanya seringkali melahirkan berbagai kekerasan politik.

Dengan kata lain, jika para pemimpin dan aktor politik kita sangat berempati terhadap penerapan nilai-nilai demokrasi, maka keseluruhan unsure di atas yang harus dipikirkan, dan dijadikan platform politik jangka panjang. Jangan seperti sekarang, semuanya lebih tertarik pada peristiwa politik jangka pendek, dan kepentingan kelompok yang lebih sempit. Akhirnya, yang terjadi adalah, setiap pemimpin senantiasa ingin membuat sejarahnya sendiri. Pemimpin baru selalu diikuti dengan kebijakan baru. Semuanya dimulai dari titik 'nol', hanya karena enggan dituduh

melakukan "re-inventing the wheel" (meneruskan pemimpin terdahulu). Semoga para pemimpin mulai menyadari makna ke Indonesiaan, ketimbang arti kepemimpinannya secara personal.

\*\*\*

#### FOOTNOTES

1. Profesor Riset Bidang Perbandingan Politik dan Pemikiran Pembangunan - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
2. Analisis lebih rinci mengenai hal ini, lihat bukunya *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, Norman and London: University of Oklahoma Press, 1993, khususnya Chapter 5.
3. Clifford May sebagaimana dikutip oleh Arend Lijphart, *Patterns of Democracy*, New Haven and London: Yale University Press, 1999, hlm. 1.
4. Samuel Huntington, *ibid*, hlm. 6.
5. Diadaptasi dari Huntington, hlm 37-38. Pengertian di adaptasi ini diartikan sebagai pilihan penulis (Indria Samego) terhadap sejumlah variabel yang ditawarkan Huntington, tapi ada di antaranya yang perlu diperdebatkan lebih lanjut, misalnya perunya nilai-nilai Protestantism dan aristokrasi sebagai syarat demokrasi.
6. Georg Scrcnsen, *Democracy and Democratization*, Boulder: Westview Press, 1993, hlm. 1.
7. Francis Fukuyama, "The End of History?" *The National Interest*, no. 16 (1989), hlm. 4.
8. David Held, *Models of Democracy*, Cambridge: Polity Press, 1987, hlm. 271.

## KAPOLRES METRO JAKARTA TIMUR BESERTA STAF, JAJARAN & BHAYANGKARI

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Mengucapkan

**DIRGAHAYU  
KEMERDEKAAN  
RI KE-63**



**Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945,  
Kita Lanjutkan Pembangunan Ekonomi Menuju  
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat,  
serta Kita Perkuat Ketahanan Nasional  
Menghadapi Tantangan Global**

**KAPOLRES METRO JAKARTA TIMUR  
KOMBES POL Drs HASANUDDIN, SH, MH**



# Trend Mobil Indonesia Pasca Kenaikan harga BBM YANG IRIT ATAU ALTERNATIF?

Selain kendaraan yang konsumsi bahan bakarnya super irit, bahan bakar alternatif selain minyak fosil adalah pilihan tepat saat dunia dilanda krisis energi. Tapi mengapa penggunaan bahan bakar gas bak jauh panggang dari api?

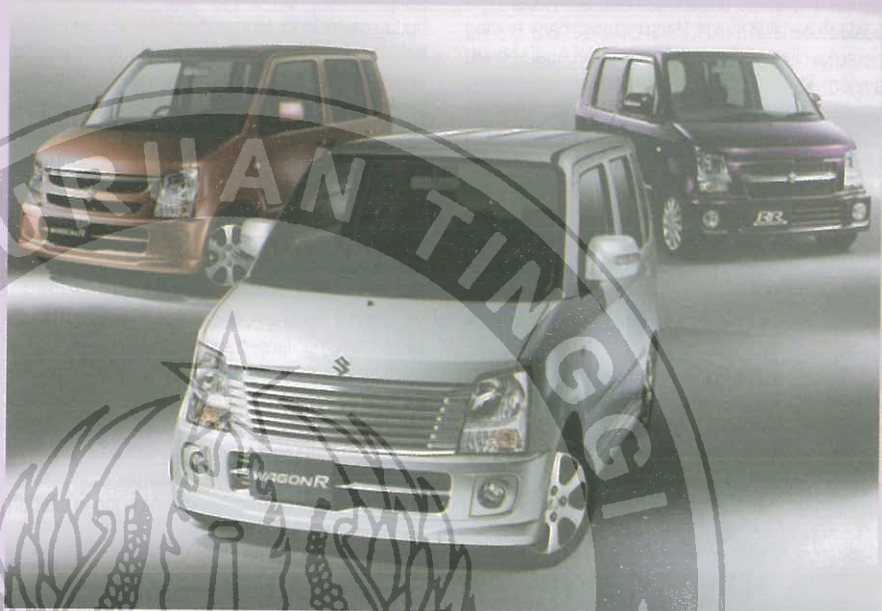
**T**EKANAN harga minyak dunia yang buntutnya memicu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) domestik, tak pelak berimplikasi pula terhadap perilaku konsumen otomotif. Atas nama desakan efisiensi, tren pasar mobil juga dipastikan bakal bergeser. Lalu, seperti apa jenis mobil yang cocok untuk Indonesia dalam waktu dekat ini?

Tak sulit jawabannya: mobil irit alias hemat konsumsi bahan bakar! Mobil jenis inilah yang bakal dicari konsumen Tapi apa cuma mobil irit pilihan yang bakal menjadi tren ke depan? Tentu tidak, karena mobil berbahan bakar alternatif selain minyak (bahan bakar fosil) juga punya peluang yang sama untuk dipilih.

"Secara umum, orang akan mencari mobil yang efisien dalam konsumsi bahan bakar. Gampangnya, konsumen akan lebih memilih mobil yang kapasitas mesinnya lebih kecil, konsumsi BBM lebih irit," tandas Mukiat Sutikno, Managing Director PT GM Auto World Indonesia (GMAWI) di Chevy Gallery Pondok Indah Mall, belum lama ini.

Mukiat mencontohkan, sebenarnya GM memiliki mesin 3.200cc untuk Chevrolet Captiva. Namun untuk pasar Indonesia justru dimasukkan yang mesinnya berkapasitas 2.400cc, karena dinilai lebih cocok. "Begitu pula pada empat produk GM yang meluncur tahun ini, Chevrolet Captiva Diesel, Aveo, Optra dan Estate. "Semua *engine size*-nya sudah dirancang untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM. Engine kecil bukan hanya untuk city car tapi juga untuk Multi Purpose Vehicle (MPV) kecil juga," paparnya.

Menjawab isu mahalnya BBM, Mukiat menilai pasar Indonesia sebetulnya lebih cocok dikembangkan mobil berbahan bakar alternatif. "Contohnya gas. LGV (Liquid Gas



for Vehicle) itu per liter hanya Rp 3.600, tidak ada subsidi. Bandingkan dengan premium yang sekarang Rp 6.000 per liter, itupun masih harga yang disubsidi. Sayangnya, bahan bakar alternatif seperti ini justru kurang dipacu untuk dikembangkan di dalam negeri," tandasnya.

Itu pula sebabnya Vice President Director PT Astra Daihatsu Motor, Sudirman Maman Rusdi, menyayangkan isu mobil berbahan bakar alternatif belum ada yang konkret. Padahal, lanjutnya, di Jepang sudah mengarah dan lebih berkembang ke mobil hybrid.

Masih menurut Sudirman, bermain di *engine* berkapasitas kecil itu juga perlu inovasi. Ia mencontohkan Jepang yang cenderung memilih mengembangkan mobil dengan mesin ber-cc kecil atau istilahnya 'Key car', hanya 660cc, 850cc atau paling besar 1.000cc — di Jepang dikenal dengan istilah 'Key car' — yang amat irit BBM namun bertenaga besar karena mengusung teknologi maju. "Untuk kelas ini, di Jepang Daihatsu nomor satu. Apalagi saat ini, dengan naiknya harga minyak dunia maka *share*-nya naik lagi."

Sudirman tak berlebihan. Faktanya, kendaraan hybrid pun kini tengah dicoba untuk dialihkan ke bahan bakar gas, seperti CNG. Daihatsu, kata Sudirman, berencana menawarkan kendaraan komersial yang sudah dilengkapi dengan kit yang bisa menggunakan CNG. Sehingga, konsumen punya pilihan untuk mengurangi biaya operasional kendaraannya. Apalagi, pemerintah memang sedang mengarah ke bahan bakar gas ini. "Dalam satu-dua bulan ini kami akan mengeluarkan paket hemat BBM, mengurangi *operation cost* dan ramah lingkungan. Soal jaminan keselamatan atas penggunaan bahan bakar gas (BBG), ini perlu edukasi," paparnya.

Di tempat terpisah, Presiden Direktur PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, Gunadi Sindhuwinata punya pendapat agak berbeda. Menurutnya, mobil irit bukan dilihat dari kapasitas mesinnya. "Mobil irit tak selalu identik dengan kapasitas engine atau cc yang kecil," tukasnya.

Artinya, masih kata Gunadi, bicara efisiensi harus melihat pula rasio tenaga yang dihasilkan. Mobil ber-cc besar sekalipun,

seperti Audi 2.800cc, itu juga tergolong irit konsumsi BBM-nya karena menggunakan *engine* yang *advance*, mempunyai Ignition Control Unit (ICU) yang *advance* pula. Sehingga, pemakaian BBM bisa dikontrol sesuai yang dibutuhkan. Bandingkan dengan city car asal Cina, Cherry QQ yang bermesin 800cc, dengan rasio yang sama, bisa dikatakan keduanya efisien. "Teknologi baik, perawatan baik, sangat membantu menekan konsumsi BBM."

Lalu, jika mobil-mobil baru semuanya telah bertumpu pada penggunaan mesin berteknologi maju yang efisien, bagaimana nasib mobil-mobil yang telah beredar lebih dulu? Nah, menurut Gunadi, sebetulnya tak ada alasan untuk 'membuang' begitu saja semua kendaraan lama yang sudah beredar. Yang perlu dilakukan, lanjutnya, adalah penggunaan bahan bakar yang tepat dengan teknologi yang ada, sehingga tidak menjadi lebih boros. "Kuncinya, melakukan inspeksi dan perawatan secara reguler. Cuma, memang kebanyakan konsumen kita masih malas untuk melakukan ini. Bahkan banyak juga yang mengerjakan sendiri. Saya mencatat, meskipun tiap kendaraan diberikan buku *service guarantee* yang mengatur ada tiga kali kunjungan ke bengkel secara gratis, tapi faktanya hanya 30% pelanggan yang menggunakan hal itu. Padahal kalau ke bengkel, terutama untuk mobil yang teknologinya *advance*, jauh lebih terjamin karena bengkel resmi sudah *computerized*," tambah Gunadi.

Hal senada diungkap Rizwan Alamsjah, Direktur Marketing PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors - APTM Mitsubishi. "Ketika minyak fosil mahal, orang tentu mencari mobil irit. Tapi, karakter pasar itu kan tak hanya BBM. Pembeli juga mencari keseimbangan, mobil irit tapi bertenaga, bandel, gampang diservice, dan *aftersales*-nya bagus. Karena itu, mobil irit belum tentu ber-cc kecil," ujar Rizwan di kantornya baru-baru ini.

Menjawab dampak mahalnya BBM, menurut Rizwan, Mitsubishi lebih menekankan kepada penggunaan mobil listrik (*electric car*). "Dengan mobil elektrik, semua hal yang optimal dari sebuah mobil bisa diperoleh konsumen, yaitu efisiensi, performa, dan tentu saja juga ramah lingkungan karena tidak menimbulkan polusi. Hanya, masih butuh waktu untuk aplikasi mobil listrik secara massal karena teknologinya masih mahal dan juga infrastruktur pendukungnya belum siap, lebih-lebih di Indonesia. Faktanya, bahan bakar alternatif yang paling realistis saat ini baru bahan bakar gas," tambahnya.

Cuma, persoalannya, seperti diakui Sudirman, Mukiat, Gunadi maupun Rizwan, pemanfaatan bahan bakar alternatif seperti gas alam itu di dalam negeri justru seperti 'jauh panggang dari api'. Padahal, kata Rizwan, di negara ASEAN lain sudah digalakkan penggunaan bahan bakar alternatif selain minyak fosil. Di Malaysia misalnya, taksi sudah wajib menggunakan bahan bakar gas. "Untuk menggalakkan pemakaian CNG sebetulnya tinggal tergantung *policy* pemerintah. Pasar

itu sangat terpengaruh pemerintah. Seperti di Thailand misalnya, mobil *pick-up* laku karena pemerintahnya menerapkan pajak mobil pikap semurah mungkin, sehingga harga pikap yang dibutuhkan untuk alat angkut di sektor agroindustri, pertambangan dan retail menjadi paling murah. Lalu di Eropa, mobil bermesin Diesel harganya dimurahkan. Tapi di Indonesia, yang digalakkan pemerintah justru minibus, sehingga MPV lebih laku. Dari tahun 1970 sudah diarahkan, jangan buat sedan, buat minibus supaya muat banyak. Akhirnya di pasar yang paling banyak yang mobil itu dan orang terlanjur senang," ungkap Rizwan.

Presiden Direktur Toyota Astra Motor (TAM), Johnny Darmawan juga berpendapat sama. Faktanya, lanjut Johnny, ada beberapa konsumen Toyota yang beralih dari sedan ke mobil yang irit (*medium low*). "Avanza misalnya, penjualannya tetap kencang. Tapi MPV seperti Kijang Innova yang tadinya sempat naik ke 5.000-an unit malah turun ke 4.000-an unit. Ada koreksi sedikit. Di Toyota, Yaris, Vios, dan Rush menjadi alternatif. Sedangkan penjualan Fortuner bensin sedikit terkoreksi, tapi sebaliknya Fortuner Diesel justru naik... bahkan inden 3-4 bulan."

Yang pasti, masih kata Johnny, selain faktor mobil sebetulnya konsumsi BBM juga tergantung pada kondisi jalan. Contohnya, di beberapa negara yang kondisi jalannya jelek, pemakaian BBM-nya juga lebih boros. "Di Eropa kondisi jalannya kan mulus, tidak seperti di sini yang cenderung stop-and-go. Jalan bagus itu sebetulnya juga membuat irit."

## LEBIH COCOK GAS, CNG

**P**ENGGUNAAN bahan bakar mobil di Indonesia bisa saja beralih ke gas. Cuma, masalah suplai lah yang (masih) menjadi kendala. Pilihannya, ada CNG (*Compressed Natural Gas*), *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) atau *Liquefied Natural Gas* (LNG). Tapi dari berbagai jenis bahan bakar gas tersebut, yang paling cocok adalah CNG. Penggunaan CNG pada kendaraan bermotor itu dinilai paling aman. Bahkan dalam beberapa kasus kecelakaan kendaraan berbahan bakar gas yang terbakar, tangki CNG tetap utuh. Bertolak belakang dengan kebanyakan anggapan orang bahwa membawa gas bertekanan tinggi dalam mobil sangat berbahaya.

Benarkah CNG paling aman? "Saya juga

sebagai Executive President IATO (Ikatan Ahli Teknik Otomotif Indonesia) pernah membahas soal itu. Di Indonesia, kita bisa pakai CNG dan LPG. Cuma, untuk penggunaan LPG kurang disarankan karena sebagian besar masyarakat kita cenderung ceroboh. Ini berbahaya, karena LPG itu harus bersih. Jika bocor dan berada di permukaan tanah, lalu ada percikan api, dipastikan akan habis terbakar. Kalau CNG aman, namun CNG harus didukung oleh SPBG (*Stasiun Pompa Bahan Gas*)," papar Gunadi Sindhuwinata yang juga Presiden Direktur PT Indomobil Sukses Internasional Tbk.

Sebetulnya, lanjut Gunadi, CNG itu alternatif yang paling baik. Alasannya, pertama, karena

bersih. Kedua, harganya relatif murah dibanding gasolin alias bensin. Kalau jaringan CNG ini terbentuk, pemerintah bisa menentukan harga, misalnya Rp 1.000 per kg. Sayangnya, Gunadi sendiri meragukan hal itu bisa segera terwujud. "Coba saja lihat pengalaman yang sudah-sudah. Beberapa waktu silam DKI Jakarta mengharuskan taksi memakai gas. Tapi mengapa medadak hilang, sampai sekarang tidak ada lagi?" tanyanya.

Padahal, lanjut Gunadi, sopir taksi itu merasakan murahnya CNG. Keputusan taksi harus memakai gas itu punya dasar yang rasional di tengah kondisi belum terbentuknya jaringan pasokan gas. Taksi dipilih karena arnadanya banyak, bergerombol dan kumpul di *pool*, nah mungkin di dekat *pool*-nya bisa dipasang pompa gas. Diharapkan, dari sini bisa berkembang jaringan komersial SPBG. Selanjutnya, pemda DKI tinggal mengaitkan pendirian SPBU (*Stasiun Pengisian Bahan*

Bakar Umum) dengan mewajibkan membangun sarana pompa gas juga. "Sejauh ini di Jakarta hanya ada enam SPBG. Tapi yang enam itu saja tidak dipikirkan logistiknya, agar bisa eksis," keluhnya.

Soal teknologi otomotif atas penggunaan gas, Gunadi meyakinkan tidak masalah. Kenyataannya bisa diseting menjadi 'dual fuel'. "Saya dan tim di Suzuki termasuk yang pertama menguji itu pada tahun 1982-1983. Artinya, dari sisi industri otomotif sebetulnya sama sekali tidak ada masalah," ungkapnya.

Mitos kekhawatiran akan keamanan dan keselamatan dalam penggunaan bahan bakar gas, masih kata Gunadi, sudah seharusnya masyarakat diberi pemahaman mengenai bahan bakar gas mulai dari tabung hingga ke mesin. Memang, untuk sampai ke mesin butuh *converter* yang — lagi-lagi — memunculkan mitos kemungkinan bisa bocor. "Padahal keberadaan konverter ini tujuannya justru untuk menurunkan tekanan. Tekanan gas yang tinggi dari tabung tidak bisa langsung dimasukkan ke dalam silinder, karena silinder ini memerlukan satu tekanan tertentu. Sehingga, harus di-*convert*, makanya disebut konverter. Di Jepang semua taksi pakai gas. Di Eropa, truk atau kendaraan niaga ada yang pakai gas, demikian pula di Italia dan Selandia Baru. Kuncinya agar bisa jalan adalah di *supply*," tandas Gunadi.

Tapi memang, secara alamiah pasar akan mencari yang paling nyaman. Artinya, semua baru bisa jalan jika pemakaian tidak ada masalah, pasokan tidak ada problem. "Jaringan pasok paling penting. *Converter* bisa dibeli dan dipasang di bengkel yang kompeten. Pun tak perlu khawatir, karena dengan *engine* yang sama bisa memakai dua macam bahan bakar. Baru bisa tumbuh," imbuhnya lagi.

Pendapat serupa juga dilontarkan Mukiat Sutikno, Managing Director PT GMAuto World Indonesia (GMAWI). Untuk pasar Indonesia, katanya, mungkin lebih cocok mengembangkan mobil berbahan bakar alternatif. "Contohnya, LGV (Liquid Gas for Vehicle) itu per liter hanya Rp 3.600, tidak ada subsidi. Bandingkan dengan premium Rp 6.000 per liter. Atau mungkin CNG."

GM Global sendiri, lanjut Mukiat, fokus utamanya adalah mengembangkan produk yang bisa menggunakan energi alternatif seperti CNG (*Compressed Nature Gas*) dan ethanol. "Kalau CNG, menurut saya, sebenarnya tidak mahal. Tapi di Indonesia masih terhambat masalah ketersediaan. Coba bandingkan dengan Thailand, di sana ada 120 stasiun pengisian CNG. Di Jakarta paling

hanya tiga, kalau mau mengisi harus antri di belakang bus TransJakarta. Makanya di Thailand, GM sudah memproduksi mobil yang bisa pakai CNG," ungkapnya menambahkan.

Seperti Gunadi, Mukiat juga menyangkan masih banyak salah pengertian di masyarakat mengenai keamanan penggunaan bahan bakar gas. "Kalau selama ini sering disebut gas berbahaya, sering menimbulkan ledakan, sebetulnya itu mitos saja. Seperti LGV, komposisi gasnya hanya 20%, sedangkan 80% sisanya dalam bentuk *liquid* (cairan). Jika ada tabrakan, dampaknya kecil sekali karena ada *safety cab*-nya yang langsung mengunci," tambah Mukiat.

Yang jelas, bisa dibayangkan nyaris semua pelaku otomotif nasional berharap bahan bakar alternatif bisa menjadi fokus pemerintah saat ini, lebih-lebih setelah dunia dilanda krisis energi. Industri otomotif menyatakan siap mendukung dengan menyediakan produk yang mengakomodasi bahan bakar alternatif tersebut. GM misalnya, secara rasional lebih memilih mobil berbahan bakar alternatif daripada mobil hybrid. "Bisa CNG, LGV atau ethanol. Mobil hybrid memang pilihan yang baik, tapi saat ini harganya masih mahal. Mungkin dalam sekian tahun ke depan baru bisa menjadi alternatif massal. Di Indonesia, kami berharap penggunaan bahan bakar alternatif pada mobil bisa dilakukan sesegera mungkin. Jangan terlalu lama, karena bahan bakar harganya makin naik. Sekarang tinggal menunggu. Misalnya jika pemerintah memutuskan akan membangun beberapa station CNG di beberapa daerah, 10 lokasi di Jakarta, kami

tinggal menginformasikan ke GM di Thailand dan mereka bisa memasukkan mobil dengan CNG di Indonesia," ujar Mukiat.

Nah, tak heran jika Presiden Direktur Toyota Astra Motor (TAM), Johnny Darmawan juga berpendapat sama soal kesiapan industri untuk mengalihkan produknya mobilnya menggunakan gas. Kalangan otomotif nasional, kata Johnny, pada prinsipnya sudah siap. "Bila pemerintah men-*drive* ke arah sana, suka atau tidak suka, pemain otomotif pasti akan siap pula. Sekali wacana ke arah itu direalisasikan, kami akan langsung jalan," ujarnya.

Cuma, lanjut Johnny, saat keputusan itu diambil, pemerintah harus berani pula membuat peraturan yang '*take and give*', tanpa memaksa. Artinya, wajar pula bila pemerintah memberi insentif kepada industri otomotif untuk mendorong pelaksanaannya. "Contohnya mobil hybrid, yang harganya masih mahal karena produksinya terbilang baru. Agar bisa dijual secara massal, tentu harganya harus terjangkau kan? Nah, insentif inilah yang bisa diberikan pemerintah kepada industri otomotif agar mereka mau investasi di mobil hybrid, sehingga harganya bisa lebih murah," tandasnya.

Mobil hybrid, bagaimanapun masih butuh investasi besar dan waktu yang cukup panjang agar bisa digunakan secara massal oleh masyarakat. Jadi, yang paling realistis dalam waktu dekat ini jelas bahan bakar alternatif selain minyak fosil. Bahan bakar gas, harus diakui, adalah pilihan paling realistis. Bisa CNG, LPG, atau LNG. Kenapa tidak? [JT-KTB 2]



Taksi yang menggunakan Bahan Bakar Gas CNG

# SANDRA DEWI DAN MOMEN BERSEJARAH DALAM HIDUPNYA



**SUATU** pagi, 26 Juni lalu, bertepatan dengan Hari Anti Narkoba. Si Cantik Sandra Dewi memasuki Istana Negara dengan langkah mantap dan wajah sumringah. Tentu saja rona wajahnya terlihat bungah karena hari itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantiknya sebagai Duta Anti Narkoba, sebuah momen bersejarah dalam hidupnya.

**P**ENUNJUKAN ini dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menilai dirinya "bersih" dari narkoba, namun tetap berprestasi. Itulah kriterianya. So pasti, kegembiraan dan kebanggaan pun melingkupi Sandra Dewi. Apalagi bisa bertatap muka dengan orang pertama di Republik ini. "Senang dan bangga, itu pasti," ucap dara kelahiran 8 Agustus 1983 ini dengan penuh suka cita.

Menjadi seorang Duta Anti Narkoba, berarti siap melakukan semua hal yang berkaitan dengan pemberantasan narkoba. Maka mu-

lai saat ini secara aktif dia mengikuti berbagai kegiatan kampanye anti narkoba, baik ke pelosok-pelosok daerah maupun ke tempat-tempat yang digunakan untuk merehabilitasi para korban pengguna narkoba.

Banyak hal yang bisa dilakukan agar tak terjebak Narkoba. Begitu papar Sandra panjang lebar. Pertama adalah, kita harus sadar bahwa obat-obat terlarang tidak baik untuk hidup kita. Kedua, selalu ingat kasih sayang orang tua. Dengan mengingat jasa orang tua yang telah membesarkan kita dengan penuh

kasih sayang, maka kita akan sadar bahwa sebagai anak yang baik kita harus bisa membahagiakan mereka. "Jadi bukan malah menghancurkan mereka dengan tindakan yang menjurus pada hal-hal yang negatif," tandas "ikon" berbagai produk dan salah satu pemeran dalam sinetron *Cinta Indah 2* ini.

Selain itu, tambahnya, untuk apa bersusah payah bekerja untuk mencari uang jika hanya digunakan untuk menghancurkan hidup sendiri. Ditanya apakah memiliki keluarga atau teman dekat yang menggunakan narkoba, jawabannya tidak ada. Meski demikian, dia tak akan menutup mata alias siap membantu bila mana ada dan bertemu dengan mereka yang terjerumus dalam penggunaan narkoba. "Saya siap membantu," tegas Sandra berjanji.

Bahwa dunia hiburan sangat rentan dengan narkoba, dengan mantap diakuinya. Namun demikian gadis kelahiran Bangka Belitung ini tak merasa khawatir apalagi takut berkiprah di dalamnya. Dia akan terus berkarir di dunia hiburan yang jujur diakuinya telah memberinya banyak pengalaman termasuk materi. "Yang penting saya bekerja benar dan tidak terpengaruh oleh hal-hal buruk yang terjadi di dalamnya," ucapnya mantap.

Ya, Sandra memang tak menyukai dunia malam apalagi "dugem". Dia juga tidak pernah merokok, minum minuman keras, apalagi memakai obat-obatan terlarang. "Wah itu bukan dunia saya. Saya tak mengenalinya," ungkap putri dari pasangan Andreas Gunawan Basri dan Catharina Erliani ini.

Sandra- seperti dikatakannya- hidup hanya sekali, bekerjalah dengan baik supaya mendapatkan yang terbaik, dan mengukir berbagai prestasi. Semua itu akan lenyap jika memakai narkoba. "Semua hal yang telah saya perjuangkan selama ini dan semua prestasi saya dari kecil sampai sekarang akan terbang sia-sia," tutur dara cantik yang lulus kuliah di London School of Public Relation S1 jurusan *public relations* dan pernah bekerja di sebuah perusahaan *advertising agency* sebagai PR Promotion.

Sandra juga menegaskan lagi, bahwa ia bekerja keras untuk membahagiakan keluarganya, bukan untuk membeli obat yang bisa membuat hidupnya hancur. "Saya sangat menyayangi keluarga dan tidak ingin mereka kecewa hanya karena narkoba." tambah finalis *Fun Fearless Female* majalah *Cosmopolitan* tahun 2006 ini.

Begitu lah sosok bintang yang mengawali karirnya lewat film layar lebar *Quickie Express*, setelah bertemu dengan sutradara Nia Dinata.

[JT 03]



# UANG IDR, PALSU ATAU NIPU ?

**B**EBERAPA waktu yang lalu, beberapa media cetak memberitakan tentang tangkapnya pelaku pemalsuan uang dalam jumlah yang cukup banyak. Korban menderita kerugian cukup besar. Awal kejadian, korban didatangi oleh pelaku, dan menawarkan uang IDR dalam jumlah milyaran rupiah. Pelaku mengaku memiliki uang IDR tersebut dari mantan pejabat di era orde baru. Pelaku menawarkan korban dengan pola penukaran 1 : 2, yang artinya 2 lembar uang IDR pecahan 100.000 an, ditukar dengan 1 lembar pecahan Rp 100.000. Setelah transaksi terjadi, korban membuka peti uang IDR dimaksud, ternyata hanya mendapati tumpukan kertas berwarna merah mirip uang Rupiah, yang dibungkus plastik berlogo binatang kanguru. Di tumpukan paling atas dan paling bawah, terdapat pecahan 100.000 palsu, sedangkan tumpukan tengah hanya kertas berwarna merah menyerupai Rupiah.

## APA ITU UANG IDR ?

Ada beberapa pengertian dari istilah uang IDR ini. Versi yang pertama, IDR singkatan dari Investment Dynasty Reserve, suatu istilah yang berarti uang Rupiah atau harta peninggalan dari simpanan raja raja jaman dahulu sebagai dana cadangan rakyat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan akan pangan dan perdamaian dunia. IDR tersebut disimpan di bank Swiss, dan hanya boleh diambil oleh ahli warisnya. Versi kedua, IDR ini juga singkatan dari Invest Deposit Realization, yaitu semua harta kekayaan yang tersimpan diluar negara

swiss, seperti dalam bunker atau tempat lainnya. Sama dengan yang pertama, untuk mencairkannya harus oleh ahli waris atau orang yang ditunjuk yang didukung oleh bukti dokumen resmi, yang seolah olah diterbitkan oleh pemerintah. Versi uang IDR lainnya, adalah uang merah atau uang polimer, yaitu pecahan Rp 100.000 yang diterbitkan tahun 1999. Issue yang beredar, bahwa masih banyak uang merah ini yang tersimpan dan belum bisa diedarkan karena belum diregister oleh Bank Indonesia. Versi lainnya tentang IDR adalah singkatan dari Indonesia Rupiah. Istilah ini banyak digunakan di money changer, maupun di pusat perbelanjaan, untuk mencantumkan harga dari barang yang dijual, contoh : IDR 200,000.

## MODUS OPERANDI

Issue uang IDR seperti diatas, berkembang sejak tahun 2000 an, sejalan dengan perkembangan situasi politik saat itu, dimana Indonesia masih mengalami krisis ekonomi yang parah. Seperti diuraikan diatas, bahwa modus operandi dari uang IDR ini pada umumnya adalah penipuan. Para pelaku akan sedemikian rupa menjerat calon korban, dengan cara berupaya meyakinkan calon korban bahwa mereka memiliki uang IDR dalam jumlah yang cukup banyak. Uang IDR itu tersimpan di peti khusus dari aluminium, dan setiap gepokan uang IDR sejumlah 10 jutaan, tersusun dalam jumlah 100 jutaan, dibungkus dalam plastik dengan gambar/logo kanguru. Pelaku meyakinkan bahwa uang itu adalah asli dari percetakan di Australia, yang be-

lum sempat diedarkan. Pelaku juga mengaku bahwa uang tersebut adalah milik para pejabat era presiden Suharto, dimana uang tersebut belum diedarkan karena belum ada perintah dari Pak Harto. Memang, uang pecahan Rp. 100.000 polimer/plastik, dicetak di Australia dan Thailand. Tetapi karena mutu cetakan uang yang berasal dari Thailand kurang bagus, maka ditarik dari peredaran ( Uang ber nomor seri AAA ) dan sekarang sudah tidak lagi beredar di masyarakat. Untuk meyakinkan calon korban, sengaja dipilih tempat yang strategis dan mendukung penampilan antara lain : di depan rumah Pak Harto, Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Bank - bank swasta dan negeri, atau seputaran tempat parkir gedung Pemerintahan, hotel berbintang. Para pelaku biasanya berjumlah 3 - 5 orang dan masing masing pela-

**B**EBERAPA contoh uang IDR dan Dollar hitam yang berhasil diungkap oleh Polri :

Uang IDR dalam jumlah ratusan milyar, yang terbungkus dalam plastik berlogo kanguru



Uang IDR didalam peti aluminium



Bagian depan menyerupai uang asli polimer pecahan Rp.100.000 an



ku punya peran yang berbeda. Ada yang mengaku ajudan Jendral, PNS instansi Pemerintah, dsb. Biasanya setelah calon korban sepakat, maka korban diminta untuk membawa uang pengganti (ratusan bahkan milyaran rupiah), dan uang IDR akan dimasukkan dalam sistem perbankan di bank yang telah ditunjuk. Namun, setelah korban bertemu dengan pelaku, tiba-tiba pelaku merubah tempat atau bank yang ditunjuk itu. Dan dengan kelihaiannya meyakinkan korban, uang pengganti berpindah tempat, dibawa oleh pelaku dan korban membawa peti berisi uang IDR. Yang terjadi berikutnya...ya wasalam... pelaku kabur dengan uang ratusan bahkan milyaran rupiah, sementara korban hanya membawa peti berisi kertas yang menyerupai uang pecahan 100 ribuan polimer/plastik. Banyak korban tidak melala-

por kepada Polisi, karena malu bisa terperdaya oleh pelaku, apalagi korban adalah orang kaya atau pejabat pusat/daerah... mau untung malah buntung

Beberapa kasus menonjol yang terjadi, antara lain :

1. Pada tahun 2002, di Lampung terjadi transaksi barang 1265 box berisi uang IDR polimer palsu. Korban menderita kerugian milyaran rupiah.
2. Pada tahun 2003, di Jakarta pelaku bernama Paul mengaku punya IDR sebesar 460 trilyun Rupiah. Korban ditipu sebesar Rp 3 Milyar
3. Pada tahun 2004, di Jakarta korban mengalami kerugian Rp 500 juta yang akan ditukar dengan uang IDR 6 milyar.
4. Pada tahun 2006, terjadi pembongkaran salah satu kuburan keramat di Lampung yang diyakini adalah tempat penyimpanan IDR dari raja

Sriwijaya. Korban menelan kerugian ratusan juta Rupiah.

5. Pada tahun 2006, di Jogjakarta, korban mantan DPRD menderita kerugian ,milyaran rupiah yang ditkar dengan IDR 60 milyar.
6. Pada tahun 2008, di Solo dan Bandung. Pelaku tertangkap ketika akan mengedarkan IDR.
7. Pada tahun 2008 , di Bandung. Pelaku ditangkap ketika akan transaksi uang IDR.
8. Pada tahun 2008, di Jakarta. Pelaku WNA ditangkap dengan MO dollar hitam.

Menjelang Pemilu tahun 2009, diperkirakan akan terjadi peningkatan kasus serupa ini, dan hampir semua kasus IDR dikaitkan dengan nama beberapa mantan pejabat era Suharto, dimana penipuan atau uang palsu ala uang IDR ini (konon) digunakan untuk membiayai operasional mereka dalam rangka memenangkan pemilu tahun depan.

Satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya adalah masalah pemberitaan. Pada umumnya, Polisi memberikan info kepada wartawan, tentang terungkapnya pelaku pemalsuan uang, sehingga berita uang palsu dengan jumlah milyaran rupiah langsung menjadi headline di media massa, padahal kasus yang sebenarnya adalah kasus penipuan.

Contoh kasus serupa uang IDR adalah kasus Dollar hitam. Kasus ini juga bermoduskan penipuan. Para pelaku pada umumnya WNA dari Afrika. Mereka menawarkan kepada korban tumpukan kertas sewarna dengan Dollar, yang harus diproses secara kimia, dengan cairan khusus. Korban menjadi tertarik, karena hasil proses kimia tersebut menghasilkan uang Dollar pecahan 100 Dollar, dan bisa dibelanjakan atau ditukar di money changer. Padahal setelah korban membeli peralatan tersebut dengan jumlah dana yang besar, maka yang didapat hanya tumpukan kertas dan beberapa Dollar palsu. Kasus inipun langsung menjadi berita utama di media massa sebagai kasus pemalsuan uang, dengan jumlah milyaran rupiah.

[Drs. Arief Dharmawan, SH, MH, MM]

Bagian belakang tercetak tulisan seperti ini



Kertas plastik yang dicetak dalam jumlah banyak, seolah uang berjumlah milyaran rupiah, padahal, setiap lembar nya tercetak seperti ini.



Penipuan Dengan Uang Idr Dan Dollar Hitam

Kertas yang dicetak seperti uang kertas Rp. 100.000 emisi thn 2004



Uang Dollar Hitam (Ditengah Hanya Tumpukan Kertas)



# PSIKOLOGI 'RYAN'

**V**ERY Idam Henyansyah, warga desa Maijo Kecamatan Tembelang Kabu paten Jombang tiba-tiba muncul menjadi sosok fenomenal (meskipun konteksnya negatif sebagai tersangka kasus pembunuhan). Dari seorang "yang bukan siapa-siapa" ia menjadi selebriti bak bintang sinetron yang muncul setiap hari disemua stasiun tv di tanah air baik pagi, siang, sore, bahkan acara tv tengah malam.

Lalu siapa sebetulnya "Ryan"? dia adalah seorang pemuda (paling tidak dari fisiknya, red) berumur 30 tahun, lulusan SMA dan tanpa pekerjaan tetap namun memiliki obsesi hedonisme yang sangat besar. Dorongan inilah yang kemudian disinyalir menjadi motif terkuat dari perbuatannya melakukan pembunuhan terhadap paling tidak 11 (sebelas) orang korban.

## TERKUAKNYA KASUS.

Bermula dari ditemukannya korban mutilasi di Margonda, Depok pada tanggal 13 Juli 2008. Polisi kemudian mengidentifikasi korban tersebut sebagai Heri Santoso (40 tahun) seorang karyawan swasta. Dari penyidikan yang dikembangkan tidak berselang lama tertangkaplah tersangka pelakunya yaitu Very Idam Henyansyah yang menurut pengakuannya merasa cemburu dan cemas kekasihnya yaitu Noval akan direbut oleh korban.

Pengembangan penyidikan selanjutnya menemukan fakta-fakta antara lain bahwa "Ryan" adalah seseorang yang memiliki orientasi seks sejenis (homoseks. red) dan selain Heri Santoso bermunculanlah kemungkinan korban-korban lainnya karena diketahui telah berinteraksi dengan "Ryan" sebelumnya dan setelah itu hilang tiada kabar.

Prediksi itu ternyata benar, melalui kerja keras dengan berbagai metode penyidikan mutakhir terkuak bahwa "Ryan" dalam pengakuannya menjelaskan telah menghabisi 10 (sepuluh) orang korban di rumahnya di Maijo, Tembelang Kabupaten Jombang sebelum korban Heri Santoso. Melalui pengakuan tersebut selanjutnya penyidik melakukan penggalian di TKP dan menemukan 10 (sepuluh) kerangka manusia seperti yang telah disampaikan oleh tersangka.



Dari sinilah peristiwa tersebut meledak menjadi "kasus kriminal spektakuler di Indonesia" berbagai pemberitaan mass media cetak maupun elektronik dihiasi oleh kasus "Ryan". Munculah wawancara, diskusi, talk show, dengan pakar seperti kriminolog, psikolog, psikiater, sosiologi dan lainnya yang mengemukakan pendapatnya masing-masing sesuai sumber referensi teoritis semata tanpa didukung oleh data data faktual dan menjelaskan seakan-akan pendapatnyalah yang paling benar.

Pemberitaan-pemberitaan tersebut bahkan sudah cenderung bias, membentuk opini dan menghakimi. Di samping itu pemberitaan juga sudah mengabaikan faktor etika, moral dan perasaan keluarga para korban.

## PSIKOPATKAH IA

Kata psikopat akhir-akhir ini menjadi sangat akrab ditelinga kita. Berbagai tayangan di stasiun tv dan media cetak sebagian ahli mendiskripsikan perilaku "Ryan" sebagai psikopat dan sebagian lainnya menolaknya.

Pada tulisan ini akan disampaikan beberapa hal tentang psikopat agar menjadi sebuah pemahaman yang utuh pada pembaca sebagai berikut :

1. Definisi : Menurut DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual Of Mental Disorder) yaitu kamus besar tentang "Penyakit jiwa" istilah psikopat justru tidak tercantum di dalamnya dan di Amerika Serikat psikopat hanya digolongkan sebagai gangguan kepribadian

dis-sosial.

2. Ciri-ciri : Menurut Robert D Hare, ahli psikopati dunia dan guru besar di Universitas British Columbia, Canada menyebutkan ciri-ciri psikopat adalah selalu membuat kamufase, memutar balikan fakta, menebar fitnah dan kebohongan untuk mendapatkan kepuasan dan keuntungan diri sendiri serta tidak ada rasa penyesalan.
3. Gejala :
  - a. Sering berbohong, fasih dan dangkal. Psikopat sering kali pandai melucu dan pintar bicara, secara khas berusaha tampil dengan pengetahuan dibidang sosiologi, psikiatri, kedokteran, psikologi, filsafat, puisi, sastra, dan lain-lain. Seringkali pandai mengarang cerita yang membuatnya positif, dan bila ketahuan berbohong mereka tak peduli dan akan menutupinya dengan mengarang kebohongan lainnya dan mengolahnya seakan-akan itu fakta.
  - b. Egosentris dan menganggap dirinya hebat.
  - c. Tidak punya rasa sesal dan rasa bersalah. Meski kadang-kadang psikopat mengakui perbuatannya namun ia sangat meremehkan atau menyangkal akibat tindakannya dan tidak memiliki alasan untuk peduli.
  - d. Senang melakukan pelanggaran dan bermasalah perilaku di masa kecil.
  - e. Sikap antisosial di usia dewasa.
  - f. Kurang empati. Bagi psikopat memotong kepala ayam dan memotong kepala orang tidak ada bedanya.
  - g. Psikopat juga teguh dalam bertindak agresif, menantang nyali dan perkelahian, jam tidur larut dan sering keluar rumah.
  - h. Impulsif dan sulit mengendalikan diri. Untuk psikopat tidak ada waktu untuk menimbang baik buruknya tindakan yang akan mereka lakukan dan mereka tidak peduli pada apa yang diperbuatnya atau memikirkan tentang masa depan. Pengidap juga mudah terpicu amarahnya akan hal-hal kecil, mudah bereaksi terhadap kekecewaan, kegagalan, kritik, dan mudah menyerang

orang hanya karena hal sepele.

- i. Tidak mampu bertanggung jawab dan melakukan hal-hal demi kesenangan belaka
- j. Manipulatif dan curang. Psikopat juga sering menunjukkan emosi dramatis walaupun sebenarnya mereka tidak sungguh-sungguh. Mereka juga tidak memiliki respon fisiologis yang secara normal diasosiasikan dengan rasa takut seperti tangan berkeringat, jantung berdebar, mulut kering, tegang, gemetar, bagi psikopat hal ini tidak berlaku. Karena itu psikopat seringkali disebut dengan istilah "dingin"

Terlepas dari psikopat atau tidak yang jelas "Ryan" memiliki kesadaran yang utuh dan kemampuan berinteraksi sosial dengan orang lain (termasuk penyidik) sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan.

Disekitar hidup kita juga banyak dijumpai kepribadian-kepribadian yang psikopat misalnya : koruptor dsb. Tapi toh tidak sampai melakukan tindakan "pembunuhan" dan di lain pihak ada kepribadian yang tidak psikopat tapi melakukan pembunuhan karena motif tertentu. Dengan demikian sebetulnya tidak perlu lagi menggolongkan psikopat atau tidak jika bukti materialnya sudah jelas.

#### SERIAL KILLER

Betulkah "Ryan" juga digolongkan sebagai pembunuh berantai? Jawabannya bisa ya dan juga bisa tidak. Ya, karena korbannya lebih dari satu dan selalu dihabisi ketika bersamaan pada lokasi yang sama pula serta korban memiliki kriteria tertentu (dalam hal ini

sebagian besar korban memiliki orientasi seks sejenis). Tidak, kalau unsur motivasi ekonomis lebih dominan mewarnai tindakan tersangka. Pada serial Killer biasanya motif psikologis lebih dominan.

Lagi-lagi hal ini tidaklah terlalu penting untuk diperdebatkan kecuali sebatas menambah wawasan pembaca

#### HOMOSEKS

Stigma atau labelisasi terhadap golongan masyarakat yang memiliki seks orientasi sejenis (homoseks) terjadi karena kebetulan "Ryan" termasuk dalam kelompok ini. Namun dari berbagai literatur psikologi sampai saat ini belum ada yang secara khas menyebutkan korelasi signifikan antara "pembunuhan" ataupun "mutilasi" dengan "homoseks". Tindak kriminal tersebut lebih bersifat individual daripada kelompok dengan kriteria tertentu. Dengan demikian maka ia (pelaku pembunuhan. red) bisa berasal dari kelompok "hetero" ataupun "homo"

Untuk sekedar pengetahuan bagi kita dapat dijelaskan bahwa orientasi seks sejenis itu sendiri sudah setua umur manusia di bumi ini. Kalau sekarang kelihatannya jumlahnya semakin banyak maka hal tersebut lebih disebabkan oleh faktor kemajuan dibidang komunikasi, teknologi dan transparansi.

#### SO WHAT?

"Ryan" adalah manusia biasa dengan



segala kekurangan dan kelebihan. Meskipun ia tersangka dari pelaku pembunuhan ia harus diperlakukan layaknya manusia dan dengan "prasangka tidak bersalah" sampai sidang pengadilan membuktikan yang sebaliknya. Artinya selama proses penyidikan berlangsung bahkan setelah keputusan dijatuhkan maka kesehatan jiwa raganya juga harus tetap diperhatikan dan jika diperlukan maka pendampingan psikologis oleh para ahlinya harus dilakukan.

Di sisi lain secara arif ada beberapa pelajaran yang bisa ditarik dari kasus tersebut yaitu

1. Polri lebih waspada dan mempelajari secara profesional tentang fenomena-fenomena sosial yang ada di masyarakat sehingga tidak selalu "ketinggalan kereta".
2. Sebagai orang tua kita patut merenung tentang bagaimana mendidik dan menjalin komunikasi berkualitas dalam kehidupan keluarga karena pendidikan selama masa perkembangan juga ada pengaruhnya terhadap terbentuknya perilaku "Ryan".
3. Sebagai bangsa Indonesia kita perlu mawas diri mengapa kasus-kasus serupa sering muncul disekitar kita dengan frekwensi yang meningkat tajam. Masyarakat menjadi semakin rentan dan impulsif mudah meledak. Apa yang salah dari kita?. Demonstrasi anarkhis, tawuran antar supporter sepak bola, tidak ada disiplin berlalu lintas dan lain-lain, adalah tontonan umum yang jamak kita jumpai.

Semoga tidak ada lagi "Ryan-Ryan" lain di luar sana yang justru sedang belajar dari melihat tayangan tv dan menimbulkan inspirasi. Semoga.....!

UNTUNG LEKSONO, Drs, M.Si, psikolog (KBP dan Wakil Ketua Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia)

